

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alston, Philip, dan Franz Magnis, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gaffar, Janedjri. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Mulyawan, Rahman. 2016. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS.

Prayitno, Rahadi Budi, dan Arlis Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, Penerbitan CV BUDI UTAMA.

Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Setiawan, Dian Bakti. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryana, Cecep, dkk. 2022. *Legislatif dalam Perspektif Mahasiswa*.

Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung
Djati Bandung.

Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.
352.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan dalam Pilkada

PKPU Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pencalonan kepala daerah

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

D. Jurnal

Andanti Tyagita. 2011. "Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat
Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif
Pekerja." Volume 26 No. 1.

- Achmad Edi Subiyanto. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17. No 2.
- Adrianus Bawamenewi. 2019. Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta*,
- Alasman Mpesa. 2024. Diskursus Atas Mantan Terpidana Sebagai Calon Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 06.
- Ali, M. Ashraf dkk. 2023. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. *Setara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4.
- Anwar, Muhammad dan Saraswati, Retno. 2018. Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25.
- Atqiya, Ashfiya Nur dkk. 2024. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 6.
- Budi, Prasetyo dkk. 2022. Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.
- Budiono. 2017. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13.
- Chaerul Shaleh. 2023. Hak Politik Warga Negara dan Pemilu. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, Vol. 1, No. 1.

Dila, Salsah dan Lubis, Sofiaty. 2023. Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana untuk Ikut dalam Pilkada Ditinjau dari Siyash Dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2.

Donal Fariz. 2020. Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 2.

Faqih, Muhammad dan Intan, Putri. 2024. Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi: Apakah Perlu. *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 2.

Hasibuan, Syaiful Asmi. 2023. Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. Volume 17.

Bungasan Hutapea. 2015. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4.

Indahsari, Rahma Winny dkk. 2021. Presidential System Government in the Style of the 1945 Constitution Amendment. *Journal of Politics and Policy*, Volume 3, No. 2, Juni.

Alasman Mpesa. 2024. Diskursus Atas Mantan Terpidana Sebagai Calon Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 06.

Melianti, Retno dan Sulistyowati, Tri. 2020. Analisa Yuridis Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah Dengan Status Mantan Terpidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 2, No. 2.

Yusron Munawir. 2019. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 1.

Yusron Munawir. 2023. Disharmoni Pembatas Hak Politik Mantan Terpidana menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 3.

Inosensius dan Hendra. 2024. Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK No. 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana.

Pitria, Elen dkk. 2023. Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, Vol. 3.

Prasetyo, Arif dkk. 2022. Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2..

Ramli. 2020. Tugas Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2.

Siahaan, Maruarar. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum No. 3*, Vol. 16.

Abdhy Walid Siagian. 2022. Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2..

E. Website

Kpu.go.id, 2024 *Pengumuman DCT DPD PSU Pemilu 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12430/pengumuman-dct-dpd-psu-pemilu-2024-dapil-provinsi-sumatera-barat>

Mataram.antaranews.com, “MK diskualifikasi cawabup Pasaman sebab tak jujur soal status eks napi”,

https://www.antaranews.com/berita/4669097/mk-diskualifikasi-cawabup-pasaman-sebab-tak-jujur-soal-status-eks-napi?utm_source=chatgpt.com,

diakses pada tanggal april 2025

INDONESIA CORRUPTION WATCH, *138 Kandidat dalam Pilkada*

Diduga Terkait Kasus Korupsi: Publik Perlu Aktif Telusuri Rekam

Jejak, <https://antikorupsi.org/id/138-kandidat-dalam-pilkada-diduga-terkait-kasus-korupsi-publik-perlu-aktif-telusuri-rekam-jejak>,

News.detik.com, *Belum Lewati Masa Jeda, Amrullah Didiskualifikasi MK di Pilbup Parigi Moutong*, <https://news.detik.com/pilkada/d-7794036/belum-lewati-masa-jeda-amrullah-didiskualifikasi-mk-di-pilbup-parigi-moutong>, diakses pada april 2025.

Infoaceh.net, *4 Mantan Terpidana Maju Calon Kepala Daerah di Pilkada Aceh*, <https://infoaceh.net/politik/4-mantan-terpidana-maju-calon-kepala-daerah-di-pilkada-aceh/>,

Liks.suara.com, ”Saat Eks Koruptor Melenggang di Pilkada 2024:

Cermin Buruknya Kaderisasi Parpol dan Hilangnya Kontrol

Publik”, [https://liks.suara.com/read/2024/09/06/101256/saat-eks-](https://liks.suara.com/read/2024/09/06/101256/saat-eks-koruptor-melenggang-di-pilkada-2024-cermin-buruknya-kaderisasi-parpol-dan-hilangnya-kontrol-publik)

[koruptor-melenggang-di-pilkada-2024-cermin-buruknya-](https://liks.suara.com/read/2024/09/06/101256/saat-eks-koruptor-melenggang-di-pilkada-2024-cermin-buruknya-kaderisasi-parpol-dan-hilangnya-kontrol-publik)

[kaderisasi-parpol-dan-hilangnya-kontrol-publik](https://liks.suara.com/read/2024/09/06/101256/saat-eks-koruptor-melenggang-di-pilkada-2024-cermin-buruknya-kaderisasi-parpol-dan-hilangnya-kontrol-publik)

Nasional.kompas.com, “Survei Litbang Kompas: Eks Koruptor Bisa Jadi
Caleg,

AncamDemokrasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/10283381/survei-litbang-kompas-eks-koruptor-bisa-jadi-caleg-ancam-demokrasi>

